BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA – P) TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diselesaikan,

Penyusunan Renja-P Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yag telah berpasrtisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2024. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan Penanganan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 23 Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten

Dr. Agus Supriyadi., S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan) Tahun 2024 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2024 36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40
3.1 Rencana Kerja 40
3.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah 45
BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Anggaran dan Capaian kinerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten s.d Triwulan II Tahun 2023	9
Tabel 2.2.	Pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	33
Tabel 2.3	Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	34
Tabell 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Untuk APBD Perubahan Tahun 2023	38
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022	42
Tabel 3.2.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Rencana Pendanaan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP Tahun 2023	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Oleh karena itu Dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja Perubahan

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Implementasi program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Renja tahun 2023 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satpol PP Provinsi Banten memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka-kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten agar target kinerja tahun 2024 tercapai, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Banten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusunan Perubahan APBD Satpol PP Tahun 2024.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.
3. Sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan program, kegiatan dan ketercukupan anggaran yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, karena dinamika pelaksanaan pembangunan dan permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus

dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelakaanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan renja Satpol PP Tahun 2024 termasuk didalamnya perubahan/pergeseran penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan ringkasan perubahan Rencana Kerja, Catatan Penting dan Rencana Tindak Lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024 yang tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah 3 program dan 12 kegiatan serta 64 sub kegiatan.

Berdasarkan penetapan APBD Murni Provinsi Banten Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.333.243.670,00 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 45.489.266.670,00 (98,17%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 843.977.000,00 (1,83%). Sampai dengan 30 Juni 2024 Realiasi atau Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 20.796.539.790,00 sebesar 44,88%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.536.703.880,00 atau sebesar 55,12%.

Secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja per program, kegiatan dan subkegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini:

2.1. Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian kinerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten s.d Triwulan II Tahun 2024

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
		Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**100,00** Persen	39.958.923.350,00	**50**	20.953.776.362,00	**50**	**18.296.783.290,00**	**100,00**	**45,78**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersususnnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100,00** Persen	153.088.800,00	**50**	**74.943.100,00**	**50**	**53.938.300,00**	**100,00**	**35,23**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	44.683.200,00	2	35.499.200,00	2	28.267.000,00	100,00	**69,82**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
		Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	61.005.600,00	7	32.043.900,00	7	18.541.300,00	100,00	30,39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Laporan	7.400.000,00	3	7.400.000,00	3	7.130.000,00	100 ,00	96,35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	24.719.711.650,00	**50**	**12.535.809.342,00**	**50**	**10.670.857.808,00**	**100,00**	**43,17**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASn	12 Bulan	24.324.314.650,00	8	12.365.912.342,00	6	10.592.795.808,00	100,00	43,55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	360.000.000,00	6	150.000.000,00	6	66.050.000,00	100,00	18,35
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	8.000.000,00	4	4.000.000,00	4	3.750.000,00	100,00	46,88
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	8.000.000,00	4	4.000.000,00	4	3.900.000,00	100,00	48,75

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja		Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Bulan	4.397.000,00	1	4.397.000,00	1	4.362.000,00	100,00	99,20
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Bulan	8.000.000,00	0	4.000.000,00	0	0	0	0
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Bulan	3.800.000,00	0	1.900.000,00	0	0	0	0
			Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Bulan	3.200.000,00	0	1.900.000,00	0	0	0	0 -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	Persen	**910.520.000,00**	**50**	697.752.000,00	**50**	**589.163.000,00**	**100,00**	**64,71**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		6	Paket	766.437.000,00	5	697.752.000,00	5	589.163.000,00	100,00	76,87
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	Orang	144.083.000,00	0	0	0	0	0	0

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
		Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1.189.876.000,00	**50**	**786.887.000,00**	**50**	**696.910.709,00**	**64,11**	**58,57**
Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	148.862.000,00	100,00	99,24
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	200.000.000,00	1	186.146.800,00	1	158.657.500,00	100,00	79,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	800.000.000,00	6	431.540.200,00	6	370.191.209,00	100,00	46,27
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen Website perangkat Daerah	12	39.876.000,00	6	19.200.000,00	6	19.200.000,00	100,00	48,15
Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**523.098.000,00**	**26**	258.974.000,00	**26**	**255.361.000,00**	**100,00**	**48,82**
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	58	523.098.000,00	15	258.974.000,00	15	255.361.000,00	100,00	48,52
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**11.062.628.900,00**	**50**	**6.004.482.920,00**	**50**	**5.490.732.473,00**	**100,00**	**49,63**
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	11.062.628.900,00	6	**6.004.482.920,00**	6	5.490.732.473,00	100,00	49,63

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja		Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	Persen	**1.400.000.000,00**	**50**	**594.928.000,00**	**50**	**539.820.000,00**	**100,00**	**38,56**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan	60		1.300.000.000,00	17	544.928.000,00	17	496.420.000,00	100,00	38,19
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	100		100.000.000,00	48	50.000.000,00	48	43.400.000,00	100,00	43,40
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100	Persen	4.405.608.400,00	**60**	2.519.899.200,00	**60**	**1.880.814.100,00**	**100,00**	**42,69**
	1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			100	Persen	2.643.454.400,00	**50**	**1.625.242.200,00**	**50**	**1.409.396.200,00**	**100,00**	**53,32**
		1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama Penertiban Atas Gangguan Trantibum Wilayah Provinsi Banten	1		10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	0	100,00	- 0

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00 -	1	9.317.000,00-	100,00	93,17 -
		3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat		241	100.000.000,00	12	5.516.000,00	12	2.116.000,00	100,00	2,12
		4	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	0	100,00	0
		5	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi		2	10.000.000,00	1	9.608.000,00	1	5.800.000,00	100,00	58,00
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	48	182.841.000,00	24	92.001.000,00	24	91.863.600,00	100,00	50,24
		7	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	3	50.000.000,00	2	24.960.000,00	2	23.422.500,00	100,00	46,85
		8	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	umlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	13.924.800,00	100,00	92,83

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka aketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19	403.613.400,00	17	395.506.200,00	17	380.583.500,00	100,00	94,29
		10	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyeuluhan, Pelakasanaan Patroli, Pengamanan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	340	702.000.000,00	197	423.700.000,00	197	402.872.000,00	100,00	57,39
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Aasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasany	60	100.000.000,00	60	100.000.000,00	60	3.096.000,00	100,00	3,10
		12	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	238	1.050.000.000,00	103	528.951.000,00	103	476.400.800,00	100,00	45,37
	2	**Pe3negakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**			100 Persen	**1.036.500.000,00**	**85**	**625.166.000,00**	**25**	**339.980.500,00**	**29,00**	**32,80**

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3	250.000.000,00	2	131.992.000,00	0	0	0	0
		2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8	200.000.000,00	5	91.864.000,00	5	66.604.000,00	100,00	33,30
		3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	10	286.500.000,00	6	196.870.000,00	6	150.488.000,00	100,00	52,53
		4	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		2	70.000.000,00	1	54.400.000,00	1	31.572.000,00	100,00	45,10
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	40.715.000,00	100,00	81,43
		6	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	5.840.000,00	100,00	14,60
		7	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		1	100.000.000,00	1	57.240.000,00	1	42.024.000,00	100,00	42,02
		8	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Akti	1	40.000.000,00	1	2.800.000,00	1	2.737.500,00	100,00	6,84

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja		Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**			100	Persen	**725.654.000,00**	**60**	**269.491.000,00**	**45,00**	**131.437.400,00**	**75**	**18,11**
		1	Pengembangan Kapasitas dan KarierPPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3		200.000.000,00	2	97.112.000,00	2	52.197.500,00	100,00	26,10
		2	Pembentukan Sekretariat PPNS		1		30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	25.946.000,00	100,00	86,49
		3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		1		40.000.000,00	1	31.345.000,00	1	8.845.000,00	100,00	22,11
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		7		370.654.000,00	2	99.554.000,00	2	32.968.900,00	100,00	8,89
		5	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		1		85.000.000,00	1	11.480.000,00	0	11.480.000,00	0	13,51
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				100	Persen	**1.968.711.920,00**	**65**	726.704.000,00	**7,00**	**618.942.400,00**	**10,77**	**31,44**
	1	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**			100	Persen	**1.813.214.920,00**	**62**	**641.207.000,00**	**4**	**540.184.400,00**	**6**	**29,79**

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Penyelenggaran kerja Sama Dan Koordinasi antara Daerah berbatasan Antar Lembaga ,dan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	80.982.480,00	1	69.804.000,00	1	66.104.000,00	100,00	81,63
		2	Standarisasi sarna dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1	2.372.000,00	1	2.372.000,00	1	2.272.000,00	100,00	95,78
		3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Penolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia Penyelamatan dan Evakuasi	1	28.737.000,00	1	3.480.000,00	1	3.452.500,00	100,00	99,21
		4	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan Penanggulangan ,Penyelamatan kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50	47.000.000,00	50	21.802.000,00	50	19.186.000,00	100,00	40,82
		5	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		1	14.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0
		6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	51.840.000,00	50	40.612.000,00	50	32.900.000,00	100,00	63,46
		7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran		1	9.600.000,00	0	0,00	0	0	0	0

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan		Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1	90.000.000,00	0	0		0	0	0
		9	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran	1	2.372.000,00	0	0		0	0	0
		10	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		1	11.246.000,00	0	0	0	0	0	0
		11	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1	3.480.000,00	1	3.480.000,00	1	2.450.000,00	100,00	70,40
		12	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	791.905.440,00	1	267.164.000,00	1	196.301.000	100,00	28,22
		13	Sosialisasi,komunikasi,Informasi Dan Edukasi Kepada Kepentingan Dan masyarakat Terkait Pencegahan ,Penanggulangan ,Penyalamatan,Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	210.700.000,00	1	62.796.000,00	1	32.420.000,00	100,00	15,39
		14	Penyelenggaran Sistem informasai dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintergasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1	100.000.000,00	0	0		0	0	0,00

Urusan Pemerintahan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Target S.d Triwulanan II		Realisasi s.d Triwulan II		Capaian s.d Triwulanan II	
					Kinerja		Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Kinerja /Target (%)	Realisasi/ Pagu (%)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10
		15	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencegahan danpenanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	1		28.737.000,00	1	28.737.000,00	1	28.290.900,00	100,00	98,45
		16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	4		365.000.000,00	3	140.960.000,00	3	129.628.000,00	100,00	35,51
	2	**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamtan Kebakaran dan Penyelamtan Non Kebakaran**			100	Persen	155.497.000,00	**40,00**	85.497.000,00	**39,64**	**99.095.000**	**99,10**	**50,65**
		1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Laporan	70.000.000,00	1	85.497.000,00	1	78.758.000,00	100,00	92,12
		2	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Laporan	85.497.000,00	0	0	0	0	0	0

Secara umum capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, telah sesuai dengan target rencana, baik kinerja capaian fisik maupun tingkat serapan anggaran. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Banten sampai dengan triwulan II tahun berkenaan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 7 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja target yang ingin dicapai adalah nilai 78. Sedangkan dari evaluasi per kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Capaian kinerja semua Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 Dokumen
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 7 Laporan
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 3 Dokumen

   Realisasi fisiknya sebesar 100,00% dari target artinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 53.938.300.00 atau sebesar 35,23% disbanding target realisasi untuk 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya efisiensi dan penghematan sehingga capaian kinerja bisa 100% dari target dengan anggaran yang lebih kecil dari yang dianggarkan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja semua Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kemajuan fisiknya sebesar 100,00% dari target artinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 10.670.857.808.00 atau sebesar 43,17% dari target realisasi 1 (satu) tahun. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya kinerja bulan juni yang pembayarannya dilaksanakan bulan Juli pada dan adanya efisiensi yang pembayarannya disesuaikan dengan kinerja masing masing Pegawai.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja semua Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kemajuan fisiknya sebesar 83,33% dari target Triwulan II, hal ini disebabkan pada pelaksanaan pengukuran pakaian dDinas dengan jumlah personel yang banyak memakan waktu dan sering Personil yang akan diukur bajunya tidak ada ditempat sehingga pelaksanaannya agak terhambat, dari 6 paket pengadaan Pakaian Dinas hanya 5 paket yang bisa terlaksana. sedangkan kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 589.163.000,00

atau sebesar 76,87% dari target. Realisasi keuangan tidak mencapai target karena capaian kinerja fisik tidak mencapai 100% sesuai target maka otomatis realisasi keuangan pun tidak sesuai target yang diharapkan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Capaian kinerja semua Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu :

   a. Penyediaan Peralatan rumah Tangga
   b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

   Kemajuan fisiknya sebesar 100,00% sesuai target artinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 696.910.709,00 atau sebesar 58,57% dari target 1 (satu) tahun anggaran . Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya efisiensi khususnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dimana diperoleh barang 100% dengan harga yang rendah.

5. Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Capaian kinerja semua Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu :

   e. Pengadaaan Barang Milik Daerah

   Kemajuan fisiknya sebesar 100,00% sesuai target artinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan kemajuan keuangan

sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 255.361.000,00 atau sebesar 48,82% dari target 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya efisiensi karena Pengadaaan Barang diperoleh dengan harga yang rendah.

6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Capaian kinerja Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kemajuan fisiknya mencapai 100,00% sesuai target artinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 5.490.732.473,00 atau sebesar 49,63% dari target 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan juga sifat pekerjaannya yang bersifat rutinitas. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya efisiensi pada penyediaan untuk makan dan minum rapat rutin.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Capaian kinerja Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Kemajuan fisiknya mencapai 100,00% sesuai target artinya telah dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan kemajuan keuangan

sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 539.820.000,00 atau sebesar 38,56% dari target 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan juga sifat pekerjaannya yang bersifat rutinitas. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya efisiensi yaitu terdapat beberapa kendaraan yang relative lebih terawat sehingga biaya perbaikan dan pemeliharaan menjadi lebih murah.

II. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pada Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terdapat 3 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Dari evaluasi per kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

   Capaian kinerja semua Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II, realisasi fisiknya sebesar 100,00% dari target artinya semua pekerjaan yang telah dijadwalkan telah dilaksanakan pada Triwulan II. Sedangkan realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.409.396.200,00 atau sebesar 53,32% dari target 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar 100% ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

   Capaian kinerja dari 8 Subkegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II, hanya ada 4 Sub Kegiatan yang mencapai target yaitu :

a. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja
b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja
c. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
d. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Per aturan Gubernur

Realisasi fisik untuk 4 Sub Kegiatan ini mencapai 100,00 dari target pada triwulan II. Dengan realisasi keuangan rata rata 53,00% jika dibandingkan dengan target realisasi untuk 1 (satu) tahun).

4 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target adalah :

e. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
f. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
g. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
h. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)

Capaian kinerja kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur hampir semua ditentukan oleh faktor eksternal, terutama yang terkait dengan tindak lanjut dari pengawasan yaitu dukungan sidang, pemberkasan administrasi oleh PPNS dan pembinaan dan Penyuluhan semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentunya target pekerjaan juga berkurang dan tentunya berpengaruh terhadap realisasi target kinerja dan realisasi keuangan. Capaian realisasi keuangan untuk 4 Sub Kegiatan ini adalah rata rata 15,87% dari pagu anggaran total selama 1 (satu)

tahu). Untuk sub kegiatan ini karena terkait sidang pelanggaran maka semakin sedikit siding pelanggaran semakin kecil realisasi keuangan.

Sementara untuk Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur capaian kinerja nya masih 0,00% dari target triwulan II karena adanya pergeseran jadwal karena permintaan Masyarakat untuk menjadwalkan kembali acara sosialisasi Perda dan Pergub khususnya Perda dan Pergub yang mengandung sanksi.

Realisasi keuangan secara keseluruhan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 339.980.500,00 atau sebesar 32,80% dari target 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

Capaian kinerja kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan sampai dengan triwulan II, realisasi fisiknya sangat rendah karena beberapa hal berikut :

- Jadwal kegiatan seperti pengembangan kapasitas dan karir PPNS dan pembentukan PPNS sangat tergantung oleh instasi penyelenggara pengembangan dan pembentukan PPNS yaitu POLRI, pada tahun ini jadwal pembentukan PPNS yang awal targetnya pada triwulan I terpaksa diundur pada akhir tahun karena pembentukan PPNS Banten dari dijadwalkan akhir tahun oleh POLRI.
- Pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi kegiatan dari kegiatan dan bidang lain, misal Kerjasama dan Kemitraan Pelaksanaan Perda dan Dukungan Operasional PPNS dipengaruhi dan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan planggaran Perda serta penyelidikan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh kegiatan dan bidang lain.

Rata rata capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 59,2% dari target yang titetapkan pada triwulan II. Sedangkan realisasi keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 131.437.400,00 atau sebesar 18,11% dari 1 (satu) tahun anggaran.

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdaoat 2 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Dari evaluasi per kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

   Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, 10 Sub Kegiatan dijadwalkan dilaksanakan sampai dengan triwulan II dan 6 sub kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

   Dari 10 sub kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan I dan II, hanya ada 6 sub kegiatan yang memenuhi target 100% pelaksanaannya yaitu

   a. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
   b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
   c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
   d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
   e. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Sedangkan 4 sub kegiatan lainnya tidak memenuhi target karena adanya penjadwalan Kembali pelaksanaan kegiatan khususnya yang terkait dengan melibatkan institusi lain.

Capaian realisasi keuangan untuk kegiatan ini sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 540.184.400,00 atau sebesar 29,79% dari target 1 (satu) tahun anggaran.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamtan Kebakaran dan Penyelamtan Non Kebakaran

   Capaian kinerja Sub kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran realisasi fisiknya sebesar 100,00% dari target artinya pekerjaan yang telah dijadwalkan telah dilaksanakan pada Triwulan II, dengan . Sedangkan kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 78.758.000,00 atau sebesar 92,12%. Keberhasilan capaian kinerja atau realisasi fisik sebesar100% ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Sedangkan realisasi keuangan lebih kecil dari target karena adanya efisiensi dan penghematan terutama dalam pengadaan ATK dan Makan Minum untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

   Sementara pelaksanaan Sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dijadwakan pada triwulan III dan IV.

Dengan memperhatikan permasalahan yang mempengaruhi terhadap realisasi keuangan yang tidak sesuai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang komprehensif

sehingga target capaian dapat dicapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, melalui :

1) Melakukan evaluasi mendalam terhadap belanja kegiatan/sub kegiatan, mana yang urgen atau tidak, mana yang prioritas atau tidak;
2) Proses percepatan pada sub-sub kegiatan yang sederhana dan hanya melibatkan pihak internal Satpol PP;
3) Melakukan penyesuaian belanja dan jadwal kegiatan pada Perubahan APDB 2024.

Secara umum bila dilihat dari realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, realisasi mencapai Rp. 18.296.783.290,00 atau sebesar 45,79% capaian ini sedikit dibawah target karena kinerja bulan Juni yang belum dibayarkan yaitu Tunjangan PNS dan adanya efisiensi kegiatan tanpa mengurangi capaian kinerja.
2. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, realisasi mencapai Rp. 1.880.814.100,00 atau sebesar 42,68%. Capaian realisasi anggaran dibawah target karena terkena adanya efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi capaian kinerja.
3. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, realisasi Rp. 618.942.400,00 mencapai 31,44% Capaian realisasi anggaran jauh dibawah target karena adanya penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan Pergub No. 48 Tahun 2022 pasal 15, Satpol PP Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Pasal 17 ayat 2 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
d. Program Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
e. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan

Secara geografis Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 KM^2. Secara demografi sampai dengan tahun 2021 Provinsi Banten memiliki penduduk bertempat tinggal tetap sebanyak 12.061.475 juta jiwa (BPS, Banten). jumlah penduduk tersebut belum termasuk penduduk yang tinggal tidak tetap yang telah berbaur di tengah-tengah masyarakat. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA).

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat. Perkembangan ekonomi mikro di Provinsi Banten relatif

berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati Kebijakan /regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas. disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dan penanganan bencana di Provinsi Banten.

Tolok ukur kinerja Satpol PP sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (good governance).

Kinerja Pelayanan Satpol PP diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kineja Kegiatan (Program) yang merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi s/d Triwulanan II	Capaian Triwulan II
1	2	3	4	4	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	-	-	-
2	Menurunnya Tingkat Kriminalitas dan Ketertiban Umum	Rasio Koordinasi Penegakan Perundang-Undangan Daerah	%	100	100	100	100
3	Meningkatnya koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Banten termasuk kategori berhasil karena mencapai kategori sangat memuaskan untuk indikator Rasio Penegakkan Perundang-undangan serta Rasio Kordinasi Penanganan Bencana Kebakaran. Sementara untuk capaian SAKIP baru akan dinilai oleh inspektorat pada akhir tahun berjalan.

Capaian Pelayanan Kinerja Satpol PP yang diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) program dan kegiatan pada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Program	Indikator Kinerja Kunci (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi s/d Triwulanan II	Capaian Triwulanan
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	70=80	-	-
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	%	100	100,00	100
	Persentase Penegakan Perda Perkada	%	100	100	100
	Cakupan Pengembangan PPNS Dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Trantibum	%	100	100	100
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Koordinasi Dan Penanganan Bencana Kebakaran	%	100	100	100

2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Banten tahun tahun terakhir menunjukan intensitas yang semakin meningkat, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang jika dikelola dengan baik. Tantangan yang masih dihadapi Satpol PP Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial;

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. Isu Strategis harus menjadi perhatian serius Satpol PP Provinsi Banten yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Berikut ini aspek strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal
4. Pilkada Serentak di Tahun 2024

Sedangkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten adalah:

1. Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS, Pemadam Kebakaran)
2. Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran)
3. Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provisi, kab/kota dan instansi vertika terkait
4. Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
5. Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
6. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
7. Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Perubahan Satpol PP Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Provinsi Banten dan Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Banten terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten sesuai dengan

Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Review terhadap Pelaksanaan APBD Murni Tahun 2024 perlu dilakukan dan tidak terlepas dari dinamika di lapangan serta mengakomodir aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui perwakilan DPRD dan lembaga-lembaga dari Kabupaten/Kota yang terkait dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena untuk suksesnya suatu program dan kegiatan harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

APBD P Satpol PP merupakan hasil review, dengan berbagai penjelasan berikut :

1. Kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja di akhir tahun 2024.
2. Percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026.
3. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kebutuhan anggaran pada APBD P 2024 diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Banten. Usulan-usulan program/kegiatan tersebut di evaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten, diantaranya isu strategis mengenai pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Nopember 2024. Kemudian seluruh usulan program dan kegiatan

program tersebut dibahas dengan Bappeda untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program dan kegiatan untuk APBD Perubahan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.4.Tabel Usulan Program dan Kegiatan Untuk APBD P Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP3B Palima Serang Banten	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. SPIP 3. Analisa Resiko	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP3B Palima Serang Banten	Pemeliharaan BMD	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota Provinsi Banten	1. Peningkatan Pengawalan 2. Peningkatan Opsdal 3. Peningkatan Pengamanan Pilkada 4. Peningkatan Pengamanan Unjuk Rasa Buruh (UMP) 5. Pemberdayaan Anggota Linmas	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	KP3B Palima Serang Banten	Pengawasan dan Penegakkan Perundang-undangan Daerah	

	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	KP3B Palima Serang Banten	Pengiriman mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	KP3B Palima Serang Banten	1. APAR 2. Pakaian Damkar	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten Kota	KP3B Palima Serang Banten	Bimbingan Teknis Anggota Pemadam Kebakaran	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

3.1.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 perlu Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2024 untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyeleraskan dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPD Provinsi Banten 2023-2026 pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

1. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan sasaran untuk dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang Ketentranan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan 2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Sasaran 1 : Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan penyelarasan derap langkah mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten di Tahun 2023 - 2026.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target Capaian Setiap Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80 NIai	70-80 NIai	70-80 NIai	70-80 NIai
2	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pada Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten TA. 2024 adalah:

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
2. Inmendagri No. 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
3. Permasalahan dan isu – isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk Renja P Tahun 2024 menetapkan 3 program 12 Kegiatan serta 68 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,
dengan kegiatan:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1.2 Administrasi Keuangan Daerah

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berdasarkan review terhadap Pelaksanaan APBD Murni Tahun 2024 dan tidak terlepas dinamika di lapangan serta mengakomodir aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui perwakilan DPRD dan lembaga-lembaga dari Kabupaten/Kota yang terkait dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diperlukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Penyesuaian prioritas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja di akhir tahun 2024.
2. Percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2017-2024.
3. Pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan.

3.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya **APBD Murni Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2024 sebesar Rp. 46.333.243.670,00 yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan**, namun seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika situasi dan kondisi serta masukan dari berbagai pihak terkait urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, hasil review dan melalui beberapa kali pembahasan dengan Bappeda Provinsi Banten, disepakati bahwa untuk mengejar target indikator, **APBD Peubahan Satpol PP tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 45.419.255.074 terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
APBD P SATPOL PP TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**46.333.243.670,00**	**45.419.255.074,00**	**(913.988.596)**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**39.958.923.350,00**	**38.436.135.374,00**	**(1.522.787.976,00)**
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**153.088.800,00**	**150.088.800,00**	**(3.000.000,00)**
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	44.683.200,00	44.683.200,00	0,00
1.03.01.1.01.0002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.03.01.1.01.0003	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	12	Laporan	61.005.600,00	58.005.600,00	(3.000.000,00)
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3	Laporan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**24.719.711.650,00**	**22.912.082.000,00**	**(1.807.629.650,00)**
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/ Bulan	88	Orang/ Bulan	24.324.314.650,00	22.569.365.000,00	(1.754.949.650,00)
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	360.000.000,00	307.320.000,00	(52.680.000,00)
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	4.397.000,00	4.397.000,00	0,00
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**910.520.000,00**	**864.520.000,00**	**(46.000.000,00)**
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	6	paket	6	paket	766.437.000,00	766.437.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	Orang	100	Orang	144.083.000,00	98.083.000,00	(46.000.000,00)
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**1.189.876.000,00**	**1.267.806.124,00**	**77.930.124,00**
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	1	Paket	150.000.000,00	229.000.000,00	79.000.000,00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	1	Paket	200.000.000,00	269.700.000,00	69.700.000,00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	800.000.000,00	730.706.124,00	(69.293.876,00)
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	39.876.000,00	38.400.000,00	(1.476.000,00)
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**523.098.000,00**	**695.218.000,00**	**172.120.000,00**
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58	Unit	18	Unit	523.098.000,00	695.218.000,00	172.120.000,00
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**11.062.628.900,00**	**11.139.624.650,00**	**76.995.750,00**
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Laporan	4	Laporan	11.062.628.900,00	11.139.624.650,00	76.995.750,00
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**1.400.000.000,00**	**1.406.795.800,00**	**6.795.800,00**
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	Unit	60	Unit	1.300.000.000,00	1.313.489.800,00	13.489.800,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Unit	100	Unit	100.000.000,00	93.306.000,00	(6.694.000,00)
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**6,57**	**Persen**	**6,57**	**Persen**	**4.405.608.400,00**	**4.074.535.220,00**	**(331.073.180,00)**
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**2.643.454.400,00**	**2.353.487.220,00**	**(289.967.180,00)**
1.05.02.1.01.0006	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	9.727.900,00	(272.100,00)
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	9.317.000,00	(683.000,00)
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	480	Orang	12	Orang	100.000.000,00	4.896.000,00	(95.104.000,00)
1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	9.694.400,00	(305.600,00)
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000,00	9.219.500,00	(780.500,00)
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	2	Unit	2	Unit	182.841.000,00	182.618.100,00	(222.900,00)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	12	Dokumen	1	Dokumen	50.000.000,00	23.422.500,00	(26.577.500,00)
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan	12	Laporan	15.000.000,00	13.924.800,00	(1.075.200,00)
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Laporan	2	Laporan	403.613.400,00	381.441.900,00	(22.171.500,00)
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12	Laporan	12	Laporan	702.000.000,00	631.565.320,00	(70.434.680,00)
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	150	orang	150	orang	100.000.000,00	96.648.600,00	(3.351.400,00)
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12	Laporan	12	Laporan	1.050.000.000,00	981.011.200,00	(68.988.800,00)
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**1.036.500.000,00**	**896.500.000,00**	**(140.000.000,00)**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3	Laporan	3	Laporan	250.000.000,00	200.300.000,00	(49.700.000,00)
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8	Laporan	8	Laporan	200.000.000,00	157.265.000,00	(42.735.000,00)
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2	Laporan	2	Laporan	286.500.000,00	274.457.000,00	(12.043.000,00)
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12	Laporan	12	Laporan	70.000.000,00	57.420.000,00	(12.580.000,00)
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	Dokumen	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1	Laporan	1	Laporan	40.000.000,00	36.990.000,00	(3.010.000,00)
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1	Laporan	1	Laporan	100.000.000,00	91.488.000,00	(8.512.000,00)
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	40.000.000,00	28.580.000,00	(11.420.000,00)
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**725.654.000,00**	**824.548.000,00**	**98.894.000,00**
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3	Laporan	5	Laporan	200.000.000,00	432.134.000,00	232.134.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	1	Dokumen	1	Dokumen	30.000.000,00	26.200.000,00	(3.800.000,00)
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam	1	Dokumen	1	Dokumen	40.000.000,00	37.200.000,00	(2.800.000,00)
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	7	Laporan	7	Laporan	370.654.000,00	244.014.000,00	(126.640.000,00)
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	1	Laporan	1	Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**1.968.711.920,00**	**2.908.584.480,00**	**939.872.560,00**
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**1.813.214.920,00**	**2.753.087.480,00**	**939.872.560,00**
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Dokumen	1	Dokumen	80.982.480,00	80.982.480,00	0,00
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1	Dokumen	1	Dokumen	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.04.1.01.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	1	Dokumen	1	Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50	Orang	160	Orang	47.000.000,00	35.642.000,00	(11.358.000,00)
1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Orang	200	Orang	51.840.000,00	51.840.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1	Laporan	27	Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	90.000.000,00	33.500.000,00	(56.500.000,00)
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	Dokumen	1	Dokumen	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur PemadamKebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	Laporan	2	Laporan	11.246.000,00	1.211.246.000,00	1.200.000.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	Dokumen	1	Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	791.905.440,00	665.268.000,00	(126.637.440,00)
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Dokumen	13	Dokumen	210.700.000,00	145.068.000,00	(65.632.000,00)
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	1	Kab/Kota	1	Kab/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	1	Unit	1	Unit	28.737.000,00	28.737.000,00	0,00
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4	Unit	4	Unit	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00
1.05.04.1.02	**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**155.497.000,00**	**155.497.000,00**	**0,00**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)		SELISIH Rp.
		SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Laporan	1	Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Laporan	1	Laporan	85.497.000,00	85.497.000,00	0,00
	JUMLAH TOTAL					**46.333.243.670,00**	**45.419.255.074,00**	**(913.988.596)**

BAB IV
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian misi, sasaran/target yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026 dan RPD Prov Banten Tahun 2023-2026. Renja Perubahan Satpol PP Tahun 2024 ini disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan APBD Murni Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan dinamika di lapangan serta aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui perwakilan DPRD dan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pada akhirnya Renja Perubahan Satpol PP Tahun 2024 melalui program dan kegiatannya diharapkan mampu menjawab pencapaian target-target kinerja yang akan dicapai di tahun 2024. Untuk itu diharapkan Renja-Perubahan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkada serta perlindungan masyarakat Provinsi Banten.

Serang, 23 Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dr. Agus Supriyadi., S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001